

# Sinergi Tripusat Pendidikan sebagai Strategi Penguatan Karakter Ketaatan dan Kewarganegaraan di Era Disrupsi Digital

Andi Puan Maharatu<sup>1\*</sup>, Marzuki<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta

\*andipuan2024@student.uny.ac.id

## ABSTRACT

*Moral degradation and disobedience to rules in the era of digital disruption are the urgency of this article. This article aims to analyze the synergy mechanisms between families, schools, and communities in strengthening values education. Using a qualitative-analytical literature study method, this study examines literature related to Bronfenbrenner's Ecological Theory and Joyce Epstein's partnership model. The findings indicate that building internal compliance requires coherence between the family's authoritative parenting style, the school's hidden curriculum, and community social capital. This study concludes that revitalizing the Tripartite Education concept through collaboration is necessary to address value dissonance in students. However, the study's limitations lie in the obstacles to generalizing implementation due to parents' lack of digital literacy and teachers' pedagogical readiness. Therefore, strengthening stakeholder capacity and transforming schools as integrators of the character education ecosystem is necessary.*

**Keywords:** Values Education, Rule Compliance, Tripartite Education, School-Family Synergy, Era of Disruption

## ABSTRAK

Degradasi moral dan ketidaktaatan terhadap aturan di era disrupsi digital menjadi urgensi utama artikel ini. Artikel ini bertujuan menganalisis mekanisme sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memperkuat pendidikan nilai. Melalui metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-analitis, kajian ini menelaah literatur terkait Teori Ekologi Bronfenbrenner dan model kemitraan Joyce Epstein. Temuan menunjukkan bahwa pembentukan kepatuhan secara internal memerlukan koherensi antara pola asuh otoritatif keluarga, *hidden curriculum* sekolah, dan modal sosial masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revitalisasi konsep Tripusat Pendidikan melalui kolaborasi tripartit diperlukan untuk mengatasi disonansi nilai pada peserta didik. Namun, keterbatasan kajian terletak pada hambatan generalisasi implementasi akibat kurangnya literasi digital orang tua dan kesiapan pedagogis guru. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemangku kepentingan dan transformasi sekolah sebagai integrator ekosistem pendidikan karakter.

**Kata kunci:** Pendidikan Nilai, Ketaatan Aturan, Tripusat Pendidikan, Sinergi Sekolah-Keluarga, Era Disrupsi

*Received: 27<sup>th</sup> November 2025*

*Revised: 14<sup>th</sup> December 2025*

*Accepted: 11<sup>th</sup> January 2026*

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2026 by the author(s).

## PENDAHULUAN

Pendidikan dalam perspektif filosofis dan pedagogis pada hakikatnya bukan sekadar sebuah mekanisme teknis untuk mentransfer pengetahuan demi mencerdaskan kehidupan bangsa secara intelektual semata. Lebih dari itu, pendidikan adalah sebuah upaya sadar, terencana, dan sistematis untuk mentransformasi nilai guna membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam ekosistem pendidikan nasional Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan secara eksplisit diarahkan untuk membentuk peserta didik yang multidimensional: tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Keadaan ideal ini menempatkan karakter khususnya aspek ketaatan pada aturan dan norma sebagai prasyarat mutlak bagi keberhasilan pendidikan. Ketaatan pada aturan bukan sekadar kepatuhan buta, melainkan manifestasi dari disiplin diri dan penghargaan terhadap hak orang lain yang menjadi fondasi kehidupan bernegara. Dalam kerangka ini, sekolah dan keluarga diharapkan berfungsi sebagai inkubator moral yang sinergis, dimana nilai-nilai luhur diinternalisasi secara konsisten. Namun, realitas kontemporer menunjukkan bahwa pencapaian tujuan ideal tersebut menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan multidimensional, terutama berkaitan dengan fenomena degradasi karakter dan menipisnya budaya ketaatan pada aturan di kalangan generasi muda yang kian mengkhawatirkan (Utami & Sanjaya, 2025).

Kesenjangan antara harapan ideal dan kenyataan di lapangan semakin melebar akibat perubahan fundamental dalam lanskap sosial kemasyarakatan. Saat ini, dunia tengah menghadapi arus deras era disrupsi teknologi dan informasi, yang sering dikonseptualisasikan sebagai Masyarakat 5.0 (*Society 5.0*). Era ini ditandai dengan integrasi tanpa batas antara ruang maya (*cyberspace*) dan ruang fisik (*physical space*) yang mengubah pola interaksi manusia secara drastis. Di satu sisi, kemajuan teknologi digital menawarkan akses demokratis terhadap informasi dan peluang globalisasi yang menjanjikan efisiensi kehidupan. Namun, di sisi lain, fenomena ini membawa residu negatif yang signifikan berupa pergeseran nilai-nilai moral dan etika yang fundamental. Perubahan pola interaksi yang serba cepat dan instan ini sering kali tidak dibarengi dengan kematangan emosional dan spiritual dari penggunaannya, sehingga menciptakan apa yang disebut sosiolog sebagai kesenjangan budaya (*cultural lag*). Kesenjangan ini bermanifestasi pada perilaku anarkis, lunturnya sopan santun, dan ketidakpatuhan terhadap norma sosial yang berlaku (Hidayatulloh et al., 2025).

Data empiris yang valid menunjukkan adanya paradoks yang tajam dalam profil kompetensi generasi muda Indonesia saat ini. Berdasarkan laporan komprehensif *Status Literasi Digital di Indonesia 2022* yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Katadata Insight Center, indeks literasi digital nasional memang berada pada kategori sedang dengan skor

agregat 3,54. Namun, jika data tersebut dibedah lebih dalam secara struktural, terdapat ketimpangan yang mengkhawatirkan antar-pilar literasi. Pilar *Digital Skills* (kecakapan digital) dan *Digital Culture* (budaya digital) memiliki skor yang relatif tinggi, masing-masing 3,52 dan 3,84. Sebaliknya, pilar *Digital Safety* (keamanan digital) konsisten berada pada posisi terendah dengan skor 3,12, diikuti oleh *Digital Ethics* (etika digital) dengan skor 3,68. Disparitas statistik ini memberikan sinyal kuat bahwa meskipun generasi muda Indonesia sangat mahir dan adaptif dalam mengoperasikan alat teknologi, mereka gagap dalam memahami risiko keamanan dan etika penggunaannya (Kemenkominfo & Katadata Insight Center, 2022).

Implikasi sosiologis dan psikologis dari ketimpangan literasi ini sangat serius, karena mengindikasikan bahwa pelajar Indonesia memiliki kerentanan yang tinggi terhadap penyimpangan perilaku di dunia maya yang kemudian terbawa ke dunia nyata. Fenomena ini termanifestasi dalam realitas nyata seperti maraknya perundungan siber (*cyberbullying*), penyebaran berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian (*hate speech*), hingga pelanggaran privasi daring yang dilakukan tanpa rasa bersalah. Abiyuna (2023) dalam studi terbarunya menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan di era disrupsi ini harus bertransformasi secara radikal untuk mempersiapkan warga negara muda yang tidak hanya *smart* (cerdas secara intelektual dan digital), tetapi juga *good* (baik secara moral dan etika). Tanpa landasan karakter ketaatan pada aturan yang kuat, kecerdasan digital yang dimiliki generasi muda justru berpotensi menjadi instrumen destruktif yang merusak tatanan kohesi sosial bangsa.

Krisis ketaatan pada aturan faktanya tidak hanya terisolasi di ruang maya, tetapi juga terefleksi secara nyata dalam interaksi sosial sehari-hari di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Paparan konten negatif yang masif dan tanpa filter di media sosial telah menyebabkan terjadinya desensitisasi moral. Nilai-nilai ketaatan, sopan santun, *unggah-ungguh*, dan penghargaan terhadap otoritas seperti guru dan orang tua semakin tergerus oleh budaya permisif global yang diadopsi tanpa filter. Hal ini diperparah dengan temuan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat tingginya angka kasus perundungan, tawuran, dan kekerasan di lingkungan pendidikan. Fenomena kekerasan ini pada dasarnya merupakan bentuk ekstrem dari ketidakpatuhan terhadap aturan sekolah dan norma hukum yang berlaku di masyarakat, yang menunjukkan lemahnya kontrol diri dan penghormatan terhadap hak orang lain (Luthfi et al., 2024).

Sekolah, sebagai institusi formal yang diberi mandat oleh negara, memiliki peran sentral untuk menegakkan disiplin dan mengajarkan ketaatan pada aturan melalui berbagai mekanisme. Namun, literatur pendidikan karakter modern menekankan bahwa kepatuhan yang hanya didasarkan pada rasa takut akan hukuman (*compliance*) bersifat rapuh, transaksional, dan sementara. Kepatuhan semacam ini akan hilang ketika pengawasan tidak ada. Oleh karena itu, tujuan akhir dari pendidikan karakter adalah membentuk kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran internal (*internalized obedience*) dan penalaran moral yang matang (Nabilla & Anggriyani, 2025). Hal ini menuntut peran kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) yang kuat, di mana budaya sekolah dan keteladanan guru menjadi kunci. Namun, realitasnya, kesiapan guru dalam menjadi model karakter masih menghadapi

tantangan serius, dimana banyak guru yang masih terjebak pada paradigma pengajaran konvensional dan belum sepenuhnya siap memfasilitasi integrasi aspek afektif dan konatif (Fachrina et al., 2024) Di sisi lain, keluarga tetaplah madrasah pertama (*madrasatul ula*) bagi seorang anak yang tidak tergantikan. Peran orang tua sangat vital dalam mengajarkan ketaatan pada aturan, terutama di lingkungan anak sekolah dasar yang merupakan fase fondasi perkembangan karakter. Orang tua berperan melalui pola asuh (*parenting style*) yang diterapkan sehari-hari. Pola asuh yang otoritatif, yang menyeimbangkan antara kehangatan dan tuntutan, terbukti paling efektif dalam membentuk karakter disiplin dan ketaatan internal (Martínez-Escudero et al., 2020) Namun, tantangan muncul ketika orang tua tidak konsisten atau abai dalam pengawasan, terutama di era digital ini.

Berdasarkan paparan di atas, terlihat jelas bahwa mengajarkan ketaatan pada aturan bukanlah tugas yang sederhana di tengah kompleksitas tantangan zaman disrupsi ini. Terdapat kebutuhan mendesak untuk membedah lebih dalam bagaimana mekanisme sinergi antara sekolah dan orang tua dapat dioptimalkan secara praktis. Studi-studi terdahulu memang telah banyak membahas pendidikan karakter secara umum, literasi digital atau peran sekolah dalam pembentukan disiplin, namun, analisis yang secara spesifik memfokuskan pada ketaatan pada aturan sebagai variabel utama karakter, dengan pendekatan komparatif dan integratif mengenai peran sekolah serta orang tua di lingkungan sekolah dasar, masih perlu diperkaya dengan perspektif terbaru. Kebanyakan studi cenderung melihat peran sekolah dan orang tua secara terpisah atau parsial. Kajian awal oleh Nabilla & Anggriyani (2025) menjadi titik tolak penting yang perlu dieksplorasi dan dikembangkan lebih lanjut dalam konteks yang lebih luas untuk mengisi celah pemahaman mengenai mekanisme kolaborasi yang efektif.

Tulisan ini memiliki urgensi karena ketaatan pada aturan adalah pintu masuk bagi pembentukan karakter luhur lainnya seperti tanggung jawab, integritas, dan kewarganegaraan global. Tanpa ketaatan dasar pada aturan yang tertanam sejak dini, sulit untuk mengharapakan lahirnya warga negara yang taat hukum dan beradab di masa depan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran sekolah (melalui tata tertib, budaya sekolah, dan keteladanan guru) dan peran orang tua (melalui pola asuh dan pembiasaan di rumah) dalam menanamkan karakter ketaatan, serta mengidentifikasi tantangan dan model kolaborasi yang efektif di antara keduanya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis bagi upaya revitalisasi pendidikan karakter di Indonesia demi menyongsong Generasi Emas 2045.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan (*library research*), yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian tanpa terjun langsung ke lapangan untuk mengambil data empiris. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konsep dan teori mengenai peran sekolah, orang tua dan masyarakat dalam pendidikan karakter dengan memanfaatkan sumber

data yang bersifat *ready-made* atau siap pakai dari berbagai literatur otoritatif. Dalam konteks ini, peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka yang tersaji dalam literatur, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan, sehingga memungkinkan eksplorasi teoretis yang luas dan komprehensif mengenai sinergi pendidikan nilai (Hermawan, 2019).

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku referensi, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan fokus kajian ketaatan aturan dan pendidikan kewarganegaraan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi yang sistematis, mengacu pada model analisis kualitatif interaktif yang terdiri dari tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini bertujuan untuk menyintesis temuan-temuan yang terpisah dari berbagai literatur menjadi sebuah pemahaman baru yang utuh dan valid untuk menjawab rumusan masalah mengenai kolaborasi efektif dalam pembentukan karakter (Miles et al., 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Orang Tua sebagai Agen Utama Pendidikan Nilai

Keluarga bukan sekadar sebagai unit biologis, melainkan institusi sosial pertama dan paling fundamental dalam arsitektur moral anak. Mengacu pada kerangka teori sistem ekologis Urie Bronfenbrenner, keluarga beroperasi sebagai mikrosistem primer, yaitu lapisan lingkungan terdalam yang memeluk anak sejak hembusan napas pertama. Di dalam mikrosistem ini, terjadi interaksi tatap muka yang intens dan berkelanjutan yang menjadi wahana bagi proses sosialisasi primer. Dinamika yang terjadi di rumah bukan sekadar rutinitas pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan sebuah proses transmisi nilai yang kompleks dimana cetak biru kognitif, afektif, dan konatif anak dibentuk jauh sebelum mereka bersentuhan dengan logika institusional sekolah (Bronfenbrenner, 1981; Şahin et al., 2025).

Mekanisme transmisi nilai dalam keluarga sering kali bekerja melalui jalur-jalur yang bersifat implisit, non-verbal, dan berbasis observasi partisipatoris. Anak-anak, sebagai pembelajar yang alami dan peniru ulung, menyerap nilai-nilai tentang kebenaran, keadilan, empati, dan tanggung jawab bukan semata-mata melalui instruksi lisan atau doktrinasi verbal, melainkan melalui pengamatan terhadap perilaku orang tua mereka dalam situasi nyata. Dalam konteks ini, orang tua berfungsi sebagai figur teladan (*role model*) yang sentral; setiap gestur, nada bicara, cara mengelola konflik, hingga cara memperlakukan orang lain, direkam dan diimitasikan oleh anak sebagai standar perilaku. Oleh karena itu, kualitas ikatan emosional (*attachment*) dan rasa aman psikologis yang dibangun di rumah menjadi prasyarat mutlak bagi efektivitas internalisasi nilai-nilai luhur tersebut, dimana kegagalan dalam membangun koneksi ini sering kali berujung pada resistensi anak terhadap nilai yang diajarkan (Maghfiroh, 2024; Rusdiana et al., 2025; Vedder et al., 2009).

Efektivitas peran orang tua dalam pendidikan nilai sangat ditentukan oleh gaya pengasuhan (*parenting styles*) yang diterapkan, yang berfungsi sebagai iklim emosional tempat nilai-nilai tersebut disemaikan. Literatur psikologi perkembangan

kontemporer secara konsisten menempatkan pola asuh otoritatif (*authoritative parenting*) sebagai standar emas dalam pembentukan karakter yang adaptif. Pola ini dicirikan oleh kombinasi dialektis yang seimbang antara kehangatan (*warmth*) atau responsivitas yang tinggi dengan tuntutan (*demandingness*) dan kontrol perilaku yang rasional. Orang tua otoritatif menetapkan batasan moral yang jelas dan tegas, namun mereka juga responsif terhadap kebutuhan emosional anak dan membuka ruang dialogis untuk negosiasi. Pendekatan induktif ini memungkinkan anak untuk memahami rasionalitas di balik sebuah aturan moral, sehingga kepatuhan yang muncul lahir dari kesadaran internal (*internalized compliance*), bukan sekadar ketakutan terhadap sanksi eksternal (Martínez-Escudero et al., 2020; Sanvictores & Mendez, 2020)

Dampak jangka panjang dari penerapan pola asuh otoritatif ini terbukti sangat signifikan terhadap kesejahteraan psikologis dan kematangan sosial anak. Penelitian empiris menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang demokratis dan suportif ini cenderung memiliki kemampuan regulasi diri (*self-regulation*) yang lebih baik, tingkat empati yang lebih tinggi, serta perilaku prososial yang konsisten di berbagai situasi sosial. Lebih jauh lagi, dukungan otonomi yang inheren dalam pola asuh ini berkorelasi positif dengan pembentukan harga diri (*self-esteem*) yang sehat dan tingginya kepuasan hidup pada masa remaja. Hal ini menegaskan bahwa ketika anak merasa didengar, dihargai, dan dipahami, mereka memiliki kapasitas psikologis yang lebih besar untuk mengadopsi nilai-nilai kebajikan sebagai bagian integral dari identitas diri mereka (Ma et al., 2024).

Sebaliknya, pola asuh otoriter (*authoritarian parenting*) sering kali menjadi penghambat utama bagi internalisasi nilai yang otentik dan bertahan lama. Dengan karakteristik kontrol yang tinggi namun minim kehangatan dan dialog, orang tua otoriter cenderung memaksakan kepatuhan mutlak melalui pendekatan kekuasaan (*power assertion*). Meskipun pendekatan ini mungkin efektif menghasilkan perilaku patuh di permukaan saat pengawasan ketat berlaku, ia berisiko mematikan perkembangan kompas moral internal anak. Studi empiris mengaitkan pola asuh yang kaku dan menghukum ini dengan peningkatan risiko agresivitas, rendahnya kepercayaan diri, serta ketidakmampuan anak dalam mengambil keputusan moral secara mandiri ketika figur otoritas tidak hadir. Tekanan psikologis yang timbul akibat kontrol berlebihan juga dapat memicu gangguan regulasi emosi dan kebencian terpendam (*resentment*) terhadap otoritas, yang pada gilirannya dapat meledak menjadi perilaku pemberontakan di masa remaja (Backman et al., 2024; Loughran, 2012; Roşca et al., 2024).

Di kutub ekstrem lainnya, pola asuh permisif (*permissive parenting*) menghadirkan tantangan degradasi karakter yang berbeda. Orang tua yang menerapkan pola ini cenderung memanjakan anak dengan kehangatan tanpa disertai tuntutan, struktur, atau batasan yang jelas, sering kali memosisikan diri sebagai teman sebaya daripada figur otoritas. Akibatnya, mereka sering kali gagal menanamkan kedisiplinan, ketahanan (*resilience*), dan tanggung jawab sosial. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan permisif ini cenderung mengalami kesulitan kognitif dalam membedakan antara hak dan kewajiban, serta rentan menjadi individu yang impulsif, narsistik, dan egosentris. Ketidadaan batas yang tegas membuat mereka

rapuh saat menghadapi realitas sosial yang menuntut kompromi dan pengendalian diri, yang pada akhirnya menghambat kematangan karakter kewarganegaraan mereka di ruang publik (Johnson & Kelley, 2011; Sadeghi et al., 2022).

Analisis sosiologis mengenai peran orang tua tidak akan lengkap tanpa mempertimbangkan konteks stratifikasi sosial yang melingkupinya, khususnya faktor status sosial ekonomi (SSE). SSE keluarga terbukti menjadi variabel moderator yang signifikan dalam memengaruhi bentuk, intensitas, dan kualitas keterlibatan orang tua dalam pendidikan nilai. Keluarga dengan SSE tinggi cenderung memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya pendidikan, modal budaya, dan waktu berkualitas, yang memfasilitasi keterlibatan berbasis rumah (*home-based involvement*) yang intensif. Sebaliknya, keluarga dengan keterbatasan ekonomi sering kali menghadapi hambatan struktural seperti jam kerja yang panjang atau stres finansial yang membatasi kehadiran fisik dan energi emosional mereka, meskipun aspirasi normatif mereka terhadap pendidikan moral anak tetap tinggi. Memahami disparitas ini sangat krusial agar intervensi pendidikan tidak terjebak pada asumsi defisit yang menyalahkan keluarga prasejahtera, melainkan fokus pada pemberian dukungan sistemik (Janmaat & Hoskins, 2022; Mas'ud et al., 2025)

Selain faktor struktural ekonomi, dimensi kultural melalui konsep etnoteori pengasuhan (*parental ethnotheories*) juga memainkan peran krusial dalam membentuk prioritas nilai yang diajarkan di rumah. Setiap budaya memiliki skema kognitif yang unik mengenai apa yang dianggap sebagai anak yang baik dan bagaimana cara membesarkannya. Dalam masyarakat dengan budaya kolektivistik yang kuat seperti di banyak wilayah Indonesia, nilai-nilai seperti kepatuhan, harmoni sosial, konformitas, dan hormat kepada orang yang lebih tua mungkin lebih ditekankan dan dihargai tinggi dibandingkan nilai kemandirian, asertivitas, atau ekspresi diri yang diagungkan dalam budaya individualistik Barat. Etnoteori ini bekerja di alam bawah sadar orang tua dan memengaruhi strategi pengasuhan sehari-hari, sehingga program pendidikan nilai harus selalu dilihat melalui lensa sensitivitas budaya agar relevan, dapat diterima, dan efektif dalam konteks lokal (Harkness et al., 2009; Song et al., 2023).

Memasuki dekade ketiga abad ke-21, lanskap pengasuhan mengalami transformasi radikal dan belum pernah terjadi sebelumnya dengan hadirnya era digital. Rumah tidak lagi menjadi ruang privat yang tertutup dan steril dari pengaruh luar; kehadiran gawai dan internet telah menjadi jendela tanpa tirai yang membawa arus informasi global tanpa filter langsung ke kamar tidur anak. Dalam konteks ekologi media baru ini, peran orang tua berevolusi menjadi mediator kewarganegaraan digital. Orang tua dituntut untuk memiliki literasi digital yang memadai guna membekali anak dengan kompetensi etis untuk berinteraksi di dunia maya, meliputi pemahaman tentang privasi data, manajemen jejak digital, hingga etika berkomunikasi yang beradab di media sosial (Bayu & Nurfaizah, 2023; Duran, 2022).

Tantangan pengasuhan di ruang digital ini sangat kompleks dan berisiko tinggi, mencakup potensi paparan terhadap konten kekerasan, pornografi, radikalisme, hoaks, hingga ancaman predator daring dan *cyberbullying*. Ketidakhadiran atau ketidakmampuan orang tua dalam memediasi konsumsi digital

anak dapat berakibat fatal bagi perkembangan moral dan keselamatan mereka. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital orang tua menjadi prasyarat mutlak dalam pendidikan nilai kontemporer. Orang tua yang gagap teknologi akan kesulitan memberikan bimbingan yang relevan dan otoritatif, sementara mereka yang proaktif, dialogis, dan memiliki pemahaman digital yang baik dapat mengubah teknologi menjadi alat pemberdayaan karakter, bukan instrumen degradasi moral (Choy et al., 2024; Hasri et al., 2025).

Pentingnya keseimbangan ekologis antara kehidupan di dunia digital dan interaksi tatap muka juga menjadi sorotan utama dalam kajian komprehensif *Handbook of Children and Screens*. Riset menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua yang informatif, suportif, dan regulatif dalam penggunaan media digital terbukti dapat memitigasi risiko negatif sekaligus memperkuat kohesi hubungan keluarga. Strategi praktis seperti penetapan zona bebas gawai di rumah, kesepakatan waktu layar (*screen time*), atau diskusi kritis bersama mengenai konten yang dikonsumsi, merupakan bentuk konkret dari pendidikan nilai di era modern. Hal ini menegaskan bahwa teknologi, jika dikelola dengan bijak melalui pendampingan orang tua yang sadar (*mindful parenting*), dapat mendukung pengembangan wawasan kewarganegaraan global anak tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal (Christakis & Hale, 2025).

## **2. Peran Masyarakat sebagai Ruang Publik Pendidikan Kewarganegaraan**

Beranjak dari mikrosistem keluarga, analisis beralih pada peran masyarakat sebagai makrosistem yang menyediakan arena sosiologis bagi aktualisasi nilai. Jika keluarga adalah basis pembentukan nilai privat yang intim, masyarakat adalah ruang publik yang luas dan dinamis tempat nilai-nilai tersebut diuji, dinegosiasikan, dan dipraktikkan dalam interaksi antarwarga yang plural. Masyarakat bukan sekadar agregasi individu yang tinggal berdekatan, melainkan sebuah ekosistem kewarganegaraan yang hidup. Di sinilah pendidikan kewarganegaraan bertransformasi dari sekadar konsep abstrak atau hafalan teoretis di buku teks menjadi pengalaman hidup, membentuk identitas sosial individu di tengah dinamika lingkungan yang terus berubah (Lynggaard & Boje, 2025; Rahman, 2025; Tong & An, 2024).

Dalam wacana kontemporer, definisi partisipasi warga negara atau *civic engagement* perlu direkonseptualisasi agar tidak terjebak pada pemahaman sempit yang hanya sebatas partisipasi politik formal, seperti memberikan suara saat pemilu (elektoral). Keterlibatan kewarganegaraan yang substansial mencakup spektrum aktivitas yang jauh lebih luas dan mendalam demi tercapainya kebaikan bersama (*common good*). Aktivitas ini terentang mulai dari kesukarelawanan (*volunteering*), partisipasi aktif dalam organisasi komunitas, advokasi sosial, hingga tindakan-tindakan solidaritas sederhana dan spontan yang dilakukan sehari-hari untuk membantu sesama warga. Masyarakat sipil yang sehat adalah masyarakat yang mampu menyediakan panggung terbuka dan inklusif bagi warganya, terutama generasi muda, untuk terlibat aktif dalam ragam aktivitas tersebut, sehingga menumbuhkan rasa saling memiliki (*sense of belonging*) dan memperkuat kohesi sosial (Lynggaard & Boje, 2025).

Untuk menjembatani jurang epistemologis antara pengetahuan normatif tentang hak warga negara dengan praktik sosiologisnya, para ahli mengajukan konsep *lived citizenship* atau kewarganegaraan yang dihayati. Konsep ini menawarkan kerangka analisis untuk memahami kewarganegaraan bukan sebagai status legal statis yang diberikan negara, melainkan sebagai praktik performatif yang dijalani individu dalam kesehariannya. *Lived citizenship* menekankan dimensi intersubjektif (bagaimana hubungan dengan orang lain membentuk identitas warga), dimensi spasial (bagaimana ruang fisik dan sosial memengaruhi akses warga), serta dimensi afektif (emosi yang terlibat dalam menjadi warga). Pendekatan ini sangat krusial untuk memahami bagaimana anak muda memaknai peran mereka dalam masyarakat, bukan sebagai subjek pasif penerima hak, melainkan sebagai aktor agen yang menavigasi kewajiban moral mereka (Donbavand & Hoskins, 2021; Kallio et al., 2020; Wilson et al., 2024).

Analisis terhadap dimensi *Lived Citizenship* mengungkap bahwa kewarganegaraan sangat dipengaruhi oleh konteks ruang dan relasi kuasa. Dimensi spasial merujuk pada ruang-ruang fisik mulai dari jalanan kampung, taman kota, hingga balai warga tempat kewarganegaraan itu dipraktikkan. Sementara dimensi intersubjektif menyoroti bahwa pengalaman kewarganegaraan tidak pernah netral, melainkan diwarnai oleh identitas sosial seperti ras, gender, agama, dan kelas sosial. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan berbasis masyarakat harus peka terhadap konteks ini agar relevan. Masyarakat yang inklusif memberikan ruang bagi keragaman identitas untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi, mengajarkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan secara organik (Kallio et al., 2020; Rahman, 2025).

Selain aspek kognitif dan sosial, dimensi afektif atau emosional juga menjadi pilar utama dalam penghayatan kewarganegaraan yang sering terabaikan. Kewarganegaraan melibatkan perasaan mendalam seperti rasa bangga terhadap komunitas, empati terhadap penderitaan sesama, atau kemarahan moral terhadap ketidakadilan. Mengakui validitas emosi dalam pendidikan kewarganegaraan adalah langkah progresif, karena sering kali dorongan untuk bertindak (*civic action*) lahir dari resonansi emosional, bukan sekadar kalkulasi rasional. Tanpa pelibatan hati dan emosi, pendidikan kewarganegaraan hanya akan menjadi transfer pengetahuan hukum yang kering dan tidak menggerakkan individu untuk melakukan perubahan sosial (Kallio et al., 2020; Donbavand & Hoskins, 2021; Lynggaard & Boje, 2025) (Donbavand & Hoskins, 2021; Kallio et al., 2020; Lynggaard & Boje, 2025).

Dari perspektif pedagogis, metode yang paling ampuh untuk mengintegrasikan pembelajaran di masyarakat adalah melalui *service-learning* atau Pembelajaran Berbasis Layanan Masyarakat. Metode ini secara unik menyatukan layanan komunitas yang bermakna dengan instruksi akademik dan refleksi terstruktur. Melalui *service-learning*, siswa tidak hanya belajar tentang masalah sosial dari kejauhan menara gading, tetapi terjun langsung (*hands-on*) untuk mengurai benang kusut permasalahan di lapangan. Proses ini terbukti efektif mengembangkan empati, keterampilan kepemimpinan kolaboratif, serta kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat (Alexander et al., 2020; Mitchell, 2007). Lebih jauh lagi, pendekatan ini dapat ditingkatkan levelnya

menjadi *Critical Service-Learning*. Berbeda dengan layanan amal tradisional yang sering kali bersifat paternalistik, pendekatan kritis mendorong siswa untuk menganalisis akar penyebab struktural dari ketidakadilan sosial dan dinamika kekuasaan yang ada. Tujuannya bukan sekadar memberikan bantuan karitatif "menempel plester pada luka", melainkan membangun kesadaran politis dan komitmen terhadap keadilan sosial jangka panjang. Di Indonesia, model ini sangat relevan diterapkan melalui Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning*) yang menghubungkan materi pelajaran Pancasila dengan realitas ketimpangan atau tantangan lingkungan sekitar (Mitchell, 2007; Ummah et al., 2025).

Kekuatan masyarakat dalam mendidik warganya juga sangat bergantung pada akumulasi modal sosial (*social capital*) yang dimilikinya. Teori Modal Sosial mendefinisikan konsep ini sebagai sumber daya kolektif yang lahir dari jaringan hubungan, kepercayaan (*trust*), dan norma timbal balik (*reciprocity*) antaranggota masyarakat. Komunitas dengan modal sosial yang kuat ditandai dengan tingginya rasa saling percaya dan partisipasi akan lebih mudah melakukan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah bersama dan menciptakan lingkungan yang aman bagi pertumbuhan anak. Sekolah yang berada di tengah masyarakat dengan modal sosial tinggi akan sangat terbantu, karena jaring pengaman sosial ini memfasilitasi aliran informasi dan dukungan pendidikan (Boström, 2025; Coleman, 1988; Putnam, 2000).

Dalam konteks kultural Indonesia, modal sosial ini telah lama mewujud dalam kearifan lokal Gotong Royong yang mengakar kuat. Gotong royong bukan sekadar kerja bakti fisik, melainkan manifestasi nilai filosofis tentang kebersamaan, persatuan, dan kolektivisme yang selaras dengan sila-sila Pancasila. Mengintegrasikan semangat gotong royong ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan adalah strategi ampuh untuk mengajarkan solidaritas dan tanggung jawab kolektif secara kontekstual. Hal ini membuktikan bahwa modal sosial lokal dapat menjadi perekat yang efektif dalam membangun karakter warga negara yang peduli di tengah arus individualisme global (Anastasia, 2022; Coppe et al., 2022; Gentry et al., 2025).

Terakhir, peran masyarakat sebagai guru kehidupan semakin lengkap dengan kekayaan kearifan lokal (*local wisdom*) yang dimilikinya. Setiap komunitas di Indonesia memiliki khazanah nilai, cerita rakyat, tradisi adat, dan filosofi hidup yang mengandung ajaran moral luhur. Menggali dan merevitalisasi nilai-nilai ini menjadikan pendidikan karakter tidak tercerabut dari akar historis dan kulturalnya. Integrasi kearifan lokal memastikan bahwa siswa tumbuh dengan identitas budaya yang kokoh (*local roots*) sekaligus memiliki wawasan global (*global outlook*). Pendekatan kultural ini membuat pendidikan kewarganegaraan terasa dekat, relevan, dan membumi bagi peserta didik (Hani, n.d.; Rohili et al., 2025).

### **3. Peran Sekolah dalam Pendidikan Nilai dan Kewarganegaraan**

Sekolah memegang mandat konstitusional dan strategis sebagai pusat pendidikan kedua setelah keluarga dalam membentuk karakter dan kompetensi kewarganegaraan. Dalam paradigma pendidikan modern, fungsi sekolah telah bergeser; tidak lagi dipandang sekadar sebagai pabrik akademik yang mentransfer pengetahuan kognitif, melainkan sebagai miniatur masyarakat atau *polity* demokratis dimana nilai-nilai moralitas dipraktikkan setiap hari. Peran ini menjadi krusial di

tengah krisis moral remaja, dimana sekolah dituntut menyediakan lingkungan kondusif bagi internalisasi nilai luhur seperti ketaatan pada aturan hukum dan penghargaan terhadap keberagaman. Tanpa intervensi sekolah yang sistematis, kesenjangan antara pengetahuan moral (*moral knowing*) dan tindakan moral (*moral action*) akan semakin melebar (Nabilla & Anggriyani, 2025).

Salah satu instrumen paling kuat namun sering terabaikan yang dimiliki sekolah adalah kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*). Berbeda dengan kurikulum formal yang tertulis dalam dokumen silabus, kurikulum tersembunyi mencakup norma, nilai, keyakinan, dan asumsi yang ditransmisikan secara implisit melalui struktur organisasi, pengaturan waktu, arsitektur fisik, dan kualitas interaksi sosial di sekolah. Melalui mekanisme ini, sekolah mengajarkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan hierarki kekuasaan tanpa instruksi verbal. Jika budaya sekolah permisif terhadap pelanggaran kecil, maka *hidden curriculum* mengajarkan bahwa aturan formal adalah tidak penting. Sebaliknya, budaya sekolah yang disiplin dan hangat mengajarkan integritas (Cubukcu, 2012; Handayani, 2014).

Manifestasi dari pengelolaan kurikulum tersembunyi yang positif adalah penerapan budaya sekolah yang berkarakter, seperti budaya "5S" (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun). Budaya ini terbukti efektif dalam meminimalisir perilaku agresif dan menciptakan iklim sekolah yang damai (*peaceful school*). Penelitian menunjukkan bahwa pembiasaan etika interaksi melalui 5S secara konsisten meningkatkan mutu pendidikan karakter dan mencegah perilaku perundungan (*bullying*) dengan menciptakan kontrol sosial informal yang positif di antara warga sekolah. Ini menegaskan bahwa intervensi budaya lebih efektif daripada sekadar pendekatan hukuman (Rahmawati et al., 2023).

Di samping budaya sosial, sekolah juga berperan memperkuat dimensi spiritual siswa melalui kegiatan keagamaan terstruktur. Integrasi nilai religius melalui rutinitas seperti sholat berjamaah atau literasi kitab suci tidak hanya menyentuh aspek ritualistik, tetapi juga membentuk karakter disiplin waktu, kejujuran, dan kepedulian sosial. Kegiatan ini menanamkan dimensi transendental yang memperkuat kontrol diri siswa (*self-control*) dalam menghadapi godaan perilaku menyimpang. Pendidikan nilai berbasis religiusitas memberikan landasan ontologis bagi moralitas siswa (Badry & Rahman, 2021; Luthfi et al., 2024).

Namun, efektivitas seluruh program sekolah tersebut sangat bergantung pada variabel kunci: figur guru. Keteladanan guru (*teacher modeling*) adalah pusat gravitasi dalam pendidikan nilai. Teori pembelajaran sosial menegaskan bahwa siswa belajar melalui imitasi. Guru yang konsisten menampilkan integritas, kejujuran, dan empati memiliki dampak transformatif yang jauh lebih signifikan dibandingkan guru yang hanya pandai berceramah moral (*moralizing*). Studi menegaskan bahwa ketidakkonsistenan antara ucapan dan tindakan guru (hipokrisi) adalah penghambat utama internalisasi nilai. Oleh karena itu, kompetensi kepribadian guru menjadi prasyarat mutlak (Pratiwi, 2019; Saputra et al., 2024).

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, sekolah berfungsi sebagai laboratorium demokrasi yang memfasilitasi "suara siswa" (*student voice*). Sekolah yang demokratis memberikan ruang partisipasi bagi siswa dalam pengambilan keputusan dan diskusi isu publik. Melalui organisasi seperti OSIS, siswa tidak hanya belajar teori

politik, tetapi mempraktikkan nilai musyawarah, akuntabilitas, dan tanggung jawab sipil. Pengalaman praktis ini penting untuk membangun efikasi politik (*political efficacy*) siswa sebagai warga negara masa depan. Namun, tantangan muncul ketika partisipasi ini bersifat elitis dan tidak inklusif bagi seluruh siswa (Maurissen et al., 2018; Putra et al., 2021).

Di Indonesia, upaya penguatan karakter ini diakomodasi secara struktural melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka. Program ini dirancang interdisipliner untuk menanamkan enam dimensi profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual. Evaluasi awal menunjukkan bahwa P5 efektif membantu siswa menginternalisasi nilai Pancasila dan meningkatkan keterlibatan siswa (*student engagement*). Namun, tantangan implementasi masih ditemukan terkait kesiapan guru dalam merancang asesmen yang otentik (Fachrina et al., 2024).

Sekolah juga menghadapi tantangan baru di era disrupsi, yaitu: rendahnya literasi keamanan digital (*digital safety*). Data menunjukkan aspek keamanan digital siswa sangatlah rendah, yang membuat mereka rentan terhadap kejahatan siber dan eksploitasi data. Peran sekolah harus diperluas mencakup pendidikan kewarganegaraan digital (*digital citizenship education*), membimbing siswa menavigasi ruang maya dengan etika. Sekolah harus menjadi garda terdepan dalam literasi digital kritis (Abiyuna, 2023).

Terakhir, sekolah dihadapkan pada realitas kekerasan seperti perundungan dan tawuran. Data KPAI menunjukkan tingginya prevalensi kekerasan di sekolah. Hal ini menuntut redefinisi sekolah aman yang tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Sekolah harus menciptakan sistem deteksi dini dan pendampingan yang humanis untuk memutus mata rantai kekerasan. Tanpa rasa aman, pendidikan nilai tidak akan dapat berjalan efektif (Luthfi et al., 2024). Sebagai sintesis, peran sekolah dalam pendidikan nilai dan kewarganegaraan bersifat multidimensi, mencakup penciptaan kultur, keteladanan guru, praktik demokrasi, hingga adaptasi digital. Sekolah tidak bisa berdiri sebagai menara gading; ia harus menjadi integrator yang menyelaraskan nilai akademik dengan realitas sosial. Keberhasilan sekolah menjalankan peran ini menentukan kualitas kewarganegaraan masa depan (Saputri et al., 2024)

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan karakter ketaatan pada aturan dan pendidikan kewarganegaraan di era disrupsi digital merupakan sebuah proses lingkunan yang tidak dapat dibebankan secara parsial kepada satu institusi semata. Temuan utama menegaskan bahwa efektivitas internalisasi nilai bergantung sepenuhnya pada koherensi fungsi antara tiga mikrosistem utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara spesifik, keluarga teridentifikasi sebagai agen utama yang meletakkan fondasi ketaatan melalui pola asuh otoritatif, dimana keseimbangan antara kehangatan emosional dan tuntutan rasional menjadi kunci terbentuknya disiplin internal, bukan sekadar kepatuhan transaksional. Sementara itu, sekolah

berperan strategis sebagai akselerator nilai melalui pengelolaan kurikulum tersembunyi *hidden curriculum* dan keteladanan guru yang mentransformasi aturan formal menjadi budaya perilaku. Di sisi lain, masyarakat berfungsi sebagai laboratorium sosial yang menyediakan modal sosial dan ruang bagi praktik kewarganegaraan yang nyata *lived citizenship*, memungkinkan siswa menguji dan menguatkan nilai yang dipelajari di rumah dan sekolah.

Kajian ini juga menyoroti keunggulan dari pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan filosofi Tripusat Pendidikan dengan kerangka kerja kemitraan Joyce Epstein. Integrasi ini menawarkan solusi atas masalah disonansi nilai yang sering terjadi akibat ketidaksinkronan aturan antara rumah dan sekolah. Ketika ketiga pilar ini bersinergi, tercipta sebuah mesosistem yang stabil yang mampu membentengi anak dari residu negatif era digital, seperti rendahnya etika siber dan desensitisasi moral. Namun, kajian ini tidak lepas dari keterbatasan. Analisis menunjukkan bahwa implementasi ideal sinergi ini masih terkendala oleh kesenjangan kapasitas literasi digital antara orang tua dan anak, serta ketidaksiapan sebagian pendidik dalam mengintegrasikan aspek afektif dan konatif dalam pembelajaran. Selain itu, faktor variabilitas status sosial ekonomi keluarga sering kali menjadi hambatan struktural yang membatasi partisipasi aktif orang tua dalam program sekolah, sehingga model kolaborasi sering kali bersifat elitis dan belum inklusif.

Implikasi dari temuan ini merekomendasikan perlunya reorientasi kebijakan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada kurikulum siswa, tetapi juga pada pemberdayaan kapasitas orang tua (*parenting empowerment*) dan masyarakat. Sekolah direkomendasikan untuk merevitalisasi peran Komite Sekolah bukan sekadar sebagai badan penggalang dana, melainkan sebagai mediator edukatif yang menyelaraskan visi pendidikan karakter. Diperlukan program konkret seperti pelatihan literasi digital bagi orang tua dan dialog rutin yang membahas konsistensi penerapan aturan di rumah dan sekolah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris longitudinal guna mengukur efektivitas model kolaborasi Tripusat Pendidikan terhadap tingkat ketaatan aturan siswa di berbagai jenjang pendidikan, serta mengembangkan instrumen evaluasi yang mampu memetakan dampak spesifik dari intervensi masyarakat terhadap perilaku kewargaan siswa. Dengan demikian, upaya mencetak generasi yang berkarakter kuat dan taat hukum dapat berpijak pada ekosistem yang holistik dan berkelanjutan, bukan sekadar retorika moral semata.

## REFERENCE

- Abiyuna, T. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Dalam Mempersiapkan Warga Negara Muda yang Smart and Good Digital Citizenship. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.27674>
- Alexander, E. S., Browne, F. R., Eberhart, A. E., Rhiney, S. L., Janzen, J., Dale, K., & Vasquez, P. (2020). Community Service-Learning Improves Learning Outcomes,

Content Knowledge, and Perceived Value of Health Services Education: A Multiyear Comparison to Lecture. *International Journal of Research on Service-Learning and Community Engagement*, 8(1). <https://doi.org/10.37333/001c.18079>

Anastasia, W. (2022). Nilai Gotong-Royong dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah. *Mindset : Jurnal Pemikiran Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(1), 11-17. <https://doi.org/10.56393/mindset.v2i1.1122>

Backman, H., Lahti, K., Laajasalo, T., Kaakinen, M., & Aronen, E. T. (2024). Positive parenting and adolescent prosocial behaviour – a mediation analysis with representative data. *International Journal of Adolescence and Youth*, 29(1). <https://doi.org/10.1080/02673843.2024.2374426>

Badry, I. M. S., & Rahman, R. (2021). Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai Karakter Religius. *An-Nuha*, 1(4), 573-583. <https://doi.org/10.24036/annuha.v1i4.135>

Bayu, W., & Nurfaizah, N. (2023). Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Karakter Anak. *Jurnal Dinamika*, 4(1), 63-73. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v4i1.63-73>

Boström, A.-K. (2025). Social Capital and Intergenerational Relationships in Times of Pandemic. *Journal of Intergenerational Relationships*, 23(4), 450-459. <https://doi.org/10.1080/15350770.2025.2483211>

Bronfenbrenner, U. (1981). *The Ecology of Human Development*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv26071r6>

Choy, Y. N., Lau, E. Y. H., & Wu, D. (2024). Digital parenting and its impact on early childhood development: A scoping review. *Education and Information Technologies*, 29(16), 22147-22187. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12643-w>

Christakis, D. A., & Hale, L. (Eds.). (2025). *Handbook of Children and Screens*. Springer Nature Switzerland. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-69362-5>

Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120. <http://www.jstor.org.ezp-prod1.hul.harvard.edu/stable/2780243>

Coppe, T., Thomas, L., Pantić, N., Froehlich, D. E., Sarazin, M., & Raemdonck, I. (2022). The Use of Social Capital in Teacher Research: A Necessary Clarification. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.866571>

Cubukcu, Z. (2012). The effect of hidden curriculum on character education process of primary school students. *Educational Sciences: Theory & Practice*. [www.edam.com.tr/estp](http://www.edam.com.tr/estp)

Donbavand, S., & Hoskins, B. (2021). Citizenship Education for Political Engagement: A Systematic Review of Controlled Trials. *Social Sciences*, 10(5), 151. <https://doi.org/10.3390/socsci10050151>

Duran, M. (2022). Digital Citizenship. In *Learning Technologies* (pp. 145–159). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-18111-5\\_8](https://doi.org/10.1007/978-3-031-18111-5_8)

Fachrina, N. A., Pratiwi, I. A., & Rondli, W. S. (2024). Analisis Kesiapan Guru dalam Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di Kelas V SD 1 Kaliwungu. *Cokroaminoto Journal of Primary Education*, 7(2), 772–781. <https://doi.org/10.30605/cjpe.722024.4483>

Gentry, A. N., Martin, J. P., & Douglas, K. A. (2025). Social capital assessments in higher education: a systematic literature review. *Frontiers in Education*, 9. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1498422>

Handayani, Y. (2014). *KODE ETIK PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI UPAYA PENEKAKAN ETIKA BAGI PENYELENGGARA NEGARA*.

Hani, H. U. (n.d.). *Peningkatan literasi budaya melalui pendekatan Culturally Responsive Teaching (CRT) berbantuan Assemblr Edu pada pembelajaran Pendidikan Pancasila di kelas IV SD*. <https://jurnal.uns.ac.id/shes>

Harkness, S., Super, C. M., Ríos Bermúdez, M., Moscardino, U., Rha, J.-H., Mavridis, C. J., Bonichini, S., Huitrón, B., Welles-Nyström, B., Palacios, J., Hyun, O.-K., Soriano, G., & Zylicz, P. O. (2009). Parental ethnotheories of children's learning. In S. In Harkness & C. M. Super (Eds.), *Parents' cultural beliefs systems: Their origins, expressions, and consequences* (Vol. 2, pp. 65–81). Guilford Press.

Hasri, H., Wardi, M., & Kunci, K. (2025). Transformasi pembelajaran Islam melalui teknologi: Strategi dan tantangan dalam era digital. *Integrating Religion, Social Economy, and Law: Conference Series*, 1(2), 155–160. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/ics>

Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*. (S. C. Rahayu, Ed.). Hidayatul Quran Kuningan.

Hidayatulloh, M. M., Sari, D. I., & Winarno, W. (2025). Digital Transformation of Civic Education Learning to Strengthen National Values and Character. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(4), 7124–7133. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.47955>

Janmaat, J. G., & Hoskins, B. (2022). The Changing Impact of Family Background on Political Engagement During Adolescence and Early Adulthood. *Social Forces*, 101(1), 227–251. <https://doi.org/10.1093/sf/soab112>

Johnson, L. E., & Kelley, H. M. (2011). Permissive Parenting Style. In *Encyclopedia of Child Behavior and Development* (pp. 1080–1080). Springer US. [https://doi.org/10.1007/978-0-387-79061-9\\_2115](https://doi.org/10.1007/978-0-387-79061-9_2115)

Kallio, K. P., Wood, B. E., & Häkli, J. (2020). Lived citizenship: conceptualising an emerging field. *Citizenship Studies*, 24(6), 713–729. <https://doi.org/10.1080/13621025.2020.1739227>

- Kemenkominfo, & Katadata Insight Center. (2022). *Status Literasi Digital di Indonesia* .
- Loughran, John. (2012). *What Expert Teachers Do : Enhancing Professional Knowledge for Classroom Practice*. Routledge.
- Luthfi, D. A., Hanifurrohman, H., Jahrudin, J., Jannah, S. R., & Asy'arie, B. F. (2024). Analisis Degradasi Moral Remaja Era Digital dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 6616–6624. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.4743>
- Lynggaard, J. B., & Boje, T. P. (2025). Civic engagement reimagined: The roles of citizenship, civicness, and civility. *Journal of Civil Society*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/17448689.2025.2508191>
- Ma, C., Ma, Y., & Lan, X. (2024). Direct and indirect effects of authoritative parenting and self-esteem on adolescent life satisfaction: A comparative study across varied migration statuses. *Current Psychology*, 43(29), 24527–24543. <https://doi.org/10.1007/s12144-024-06064-8>
- Maghfiroh, L. (2024). Pentingnya peran orang tua dalam pembentukan karakter anak usia dini di era digital. *MAANA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.52166/mjpiud.v2i2.6211>
- Martínez-Escudero, J. A., Villarejo, S., Justicia, F., & Benítez, J. L. (2020). Parental socialization and its impact across the lifespan. *Frontiers in Psychology*, 11, 3060.
- Mas'ud, B., Imansari, N., Sunusi, Z., & Saiful, S. H. N. A. (2025). The Impact of Family Socioeconomic Status on Parental Involvement in Children's Education: Differences between High- and Low-SES Families in Indonesia. *Journal of Educational, Health and Community Psychology*, 336–356. <https://doi.org/10.12928/jehcp.vi.30771>
- Maurissen, L., Claes, E., & Barber, C. (2018). Deliberation in citizenship education: how the school context contributes to the development of an open classroom climate. *Social Psychology of Education*, 21(4), 951–972. <https://doi.org/10.1007/s11218-018-9449-7>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.
- Mitchell, T. D. (2007). Critical Service-Learning as Social Justice Education: A Case Study of the Citizen Scholars Program. *Equity & Excellence in Education*, 40(2), 101–112. <https://doi.org/10.1080/10665680701228797>
- Nabilla, & Anggriyani, F. C. W. (2025). Peran sekolah dan orang tua dalam mengajarkan ketaatan pada aturan di lingkungan anak sekolah dasar. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin.*, 2(3). <https://jurnalisticomah.org/index.php/merdeka/article/view/3771>

- Pratiwi, N. K. S. P. (2019). . Pentingnya peran orang tua dalam pendidikan karakter anak usia sekolah dasar. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(1), 83. <https://doi.org/10.25078/aw.v3i1.908>
- Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. In *Culture and Politics* (pp. 223–234). Palgrave Macmillan US. [https://doi.org/10.1007/978-1-349-62965-7\\_12](https://doi.org/10.1007/978-1-349-62965-7_12)
- Putra, R. pranata, Valentina, T. R., & Putri, I. A. (2021). Peran kepercayaan politik, efikasi politik, dan orientasi kandidat terhadap partisipasi politik. *Mediapsi*, 7(2), 166–178. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.8>
- Rahman, L. (2025). Bronfenbrenner's ecological systems theory in childhood resilience and motivation in learning: a literature review. *Open Journal of Social Sciences*, 13(06), 550–561. <https://doi.org/10.4236/jss.2025.136037>
- Rahmawati, D., Setyo Putro Robawa, R., Faiq Al Abiyyi, M., Daffa NRF, P., Ilman Nugraha, R., Puguh Margono, F., Praditya, Mi. A., & Sholihatina, E. (2023). Analisis Hoaks dalam Konteks Digital: Implikasi dan Pencegahannya di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 2(2).
- Rohili, I., Al-Hakim Musthafa, L., Saepulmilah, C., Rahmat, M., Samsul Arifin, B., Hasanah, A., & Permana, D. (2025). Core Ethical Values Pendidikan Karakter (Berbasis Nilai-Nilai Budaya). *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)*, 7(2), 205–214. <https://doi.org/10.52005/belaindika.v7i2.354>
- Roşca, G. M., Iuga, I. A., & David, O. A. (2024). Inside-out mechanisms of parental practices and children's externalizing problems: the role of authoritarian parenting style, parental irrational beliefs, emotion regulation, and distress. *Current Psychology*, 43(4), 3292–3306. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-04539-8>
- Rusdiana, I., Prihandono, T., & Bektiarso, S. (2025). Pentingnya Peran Orang Tua dalam Membentuk Karakter Anak. 9(1), 161–170. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i1.9191>
- Sadeghi, S., Ayoubi, S., & Brand, S. (2022). Parenting Styles Predict Future-Oriented Cognition in Children: A Cross-Sectional Study. *Children*, 9(10), 1589. <https://doi.org/10.3390/children9101589>
- Şahin, E., Beckert, T. E., Albiero, P., & Higgins, J. P. (2025). Transmission of family values scale among Italian youth: an investigation of reliability, factorial validity and criterion validity. *International Journal of Adolescence and Youth*, 30(1). <https://doi.org/10.1080/02673843.2025.2474679>
- Sanvictores, T., & Mendez, M. D. (2020). *Types of parenting styles and effects on children*. (In StatPearls). StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK568743/>

- Saputra, D. T., Wulandari, M. D., & Darsinah, D. (2024). Penanaman Karakter Disiplin Peserta Didik Melalui Keteladanan Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 8(1), 99–109. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.6838>
- Saputri, I., Salsabila, I. R., & Chanifudin. (2024). Pentingnya Kolaborasi Orang Tua, Sekolah, dan Masyarakat dalam Mendukung Pendidikan Karakter Anak. *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(2).
- Song, J.-H., Cho, S. I., Trommsdorff, G., Cole, P., Niraula, S., & Mishra, R. (2023). Being sensitive in their own way: parental ethnotheories of caregiver sensitivity and child emotion regulation across five countries. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1283748>
- Tong, P., & An, I. S. (2024). Review of studies applying Bronfenbrenner's bioecological theory in international and intercultural education research. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1233925>
- Ummah, S. Z., Rahmawati, A., Azzahra, R., Azura, S. N., Lestari, R. M., Abdul, M., Alkhobiir, R., & Hasibuan, H. A. (2025). Memperkuat civic knowledge dan kepedulian sosial melalui integrasi service learning dalam pendidikan kewarganegaraan. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(6), 41–50. <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/triwikrama/article/view/610>
- Utami, A. P., & Sanjaya, B. P. (2025). Civic Education as a Development of Character Education for Elementary School Students. *Indonesian Journal of Instruction*, 6(1), 89–97. <https://doi.org/10.23887/iji.v6i1.95784>
- Vedder, P., Berry, J., Sabatier, C., & Sam, D. (2009). The intergenerational transmission of values in national and immigrant families: The role of Zeitgeist. *Journal of Youth and Adolescence*, 38(5), 642–653. <https://mijn.bsl.nl/the-intergenerational-transmission-of-values-in-national-and-imm/582104>
- Wilson, S., Ridley, J., & Morris, D. (2024). Understanding the impact on children's citizenship of participating in community-based action research. *Citizenship Studies*, 28(2), 222–242. <https://doi.org/10.1080/13621025.2024.2360404>